

SUSTAINABILITY REPORT INDUSTRI TEMBAKAU DI INDONESIA: PENERAPAN SASB STANDARDS DAN IMPLIKASINYA

Nicolaus Wahana Da Rato

Fakultas Bisnis, Universitas Multimedia Nusantara

nicolaus.darato@umn.ac.id

Diterima 19 November 2024

Disetujui 31 Desember 2024

Abstract— This study analyzes the implementation of Sustainability Accounting Standards Board (SASB) standards in sustainability reports of the tobacco industry in Indonesia. The industry faces significant scrutiny regarding the health impacts of its products, with the World Health Organization (WHO) reporting 8 million annual deaths worldwide due to tobacco. Despite various regulatory measures aimed at reducing tobacco consumption and its associated risks, such as smoking-free areas and high taxes, tobacco production and consumption in Indonesia continue to rise. Findings indicate that the majority of tobacco companies, including PT Gudang Garam Tbk and PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, fall short of SASB standards, particularly in disclosing material health-related information. The reports also reveal potential instances of greenwashing, where companies promote environmental initiatives while neglecting the negative health impacts of their products. The research emphasizes the urgency for these companies to enhance their sustainability disclosures, ensuring accuracy and relevance in line with SASB standards. Improving transparency and accountability in sustainability reporting will foster public trust and support public health.

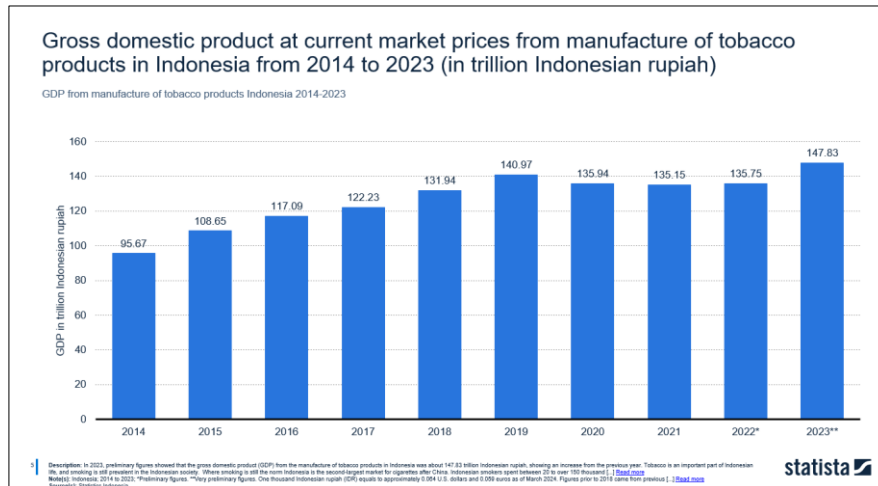
Keywords: Sustainability Reporting; Tobacco Industry; SASB Standards; Greenwashing; Disclosure Practices

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri rokok berbahan tembakau menghadapi banyak tekanan terkait dampak kesehatan dari produk yang dihasilkan. Menurut World Health Organization (WHO) produk tembakau menyebabkan 8 juta orang di dunia meninggal setiap tahun (WHO Newsroom, n.d.). Di Indonesia, berbagai regulasi yang bertujuan untuk menekan laju konsumsi produk tembakau, dan mengurangi risiko kematian telah diterbitkan. Akan tetapi, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control/FCTC*). Peraturan ini merupakan perjanjian internasional yang dirancang WHO untuk membentuk aturan global atas pengendalian tembakau (Indriastuti et al., 2022).

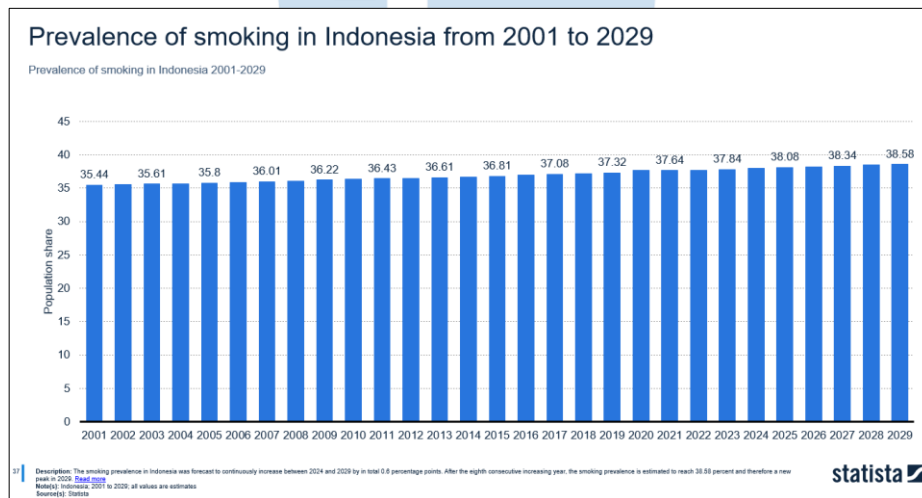
Hasil riset pasar dan industri tembakau di Indonesia oleh Statista pada September 2024 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi dan konsumsi dari produk tembakau. Dalam riset tersebut disampaikan bahwa Indonesia merupakan produsen Tembakau nomer 4 di dunia di tahun 2022, setelah China, India dan Brasil. Sementara tabel Gross Domestik Produk (GDP) produksi industri pengolahan tembakau menunjukkan rata – rata kenaikan per tahun (CAGR) sebesar 4,95 %, dari tahun 2014 sebesar Rp 95,6 Triliun menjadi Rp 147,8 Triliun pada tahun 2023.



Gambar 1. GDP Tobacco Product in Indonesia 2014-2023

Sumber: (Statista, 2024)

Dari sisi pengguna produk tembakau, diungkapkan dengan estimasi jumlah prevalensi perokok di Indonesia cenderung terus meningkat, dari tahun 2001 estimasi prevalensi perokok sebesar 35,44 % menjadi 38,58% pada 2029. Hal tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi produk tembakau melalui beberapa regulasi yang diterbitkan



Gambar 2. Estimasi Prevalensi Perokok di Indonesia 2001-2029

Sumber: (Statista, 2024)

Dari kondisi di atas, menarik untuk melihat dari sisi produsen produk tembakau dalam hal ini adalah perusahaan rokok, bagaimana upaya dan inovasi yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko kesehatan dan tercermin dalam laporan keberlanjutan. Secara umum terkait laporan keberlanjutan, ada 5 (lima) badan penerbit *framework* dan *standard-setting* yaitu IIRC (*International Integrated Reporting Council*), SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*), CDSB (*Climate Disclosure Standards Board*), GRI (*Global Reporting Initiative*) dan CDP (*Carbon Disclosure Project*) (web.iaiglobal.or.id).

Untuk penelitian ini, *framework* yang digunakan adalah *framework* SASB yang dikeluarkan oleh *International Sustainability Standards Board (ISSB)*, yang juga

mengeluarkan *International Financial Accounting Standard (IFRS) S1* dikenal sebagai "*General Requirements for Disclosure of Sustainability Information*," menetapkan prinsip-prinsip dan persyaratan umum untuk pengungkapan informasi keberlanjutan pada 31 Maret 2022. Walaupun saat ini penggunaan standard GRI masih dominan pada perusahaan di Indonesia, namun dengan ditetapkannya IFRS S1 dan S2 akan semakin di adopsi oleh perusahaan karena sudah mengadopsi arsitektur kerangka kerja *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)* (PwC, 2023). SASB menyediakan standar pengungkapan terkait keberlanjutan yang lebih terfokus dan sektor-spesifik. *The SASB Standards are a set of 77 industry-specific sustainability accounting standards ("SASB Standards" or "Industry Standards"), categorised pursuant to the Sustainable Industry Classification System® (SICS®)* (ISSB IFRS Foundation, 2023). Dalam standar SASB, industri tembakau diatur tersendiri dan masuk dalam sektor *Food & Beverages*. Berdasarkan standar di atas, jenis yang masuk dalam *Tobacco industry entities manufacture tobacco products including cigarettes, cigars and smokeless tobacco products. Many large tobacco entities operate globally. Entities may obtain or sell exclusive rights to sell some brands of cigarettes in diverse markets. Independent farmers grow most tobacco, and they typically sell their crops to tobacco merchants or to manufacturers under contract* (ISSB IFRS Foundation, 2023).

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang dibuat oleh perusahaan dalam industri tembakau ini apakah sudah memenuhi standar SASB untuk menilai dan mengungkap dampak material terhadap kesehatan publik dan praktik pemasaran. Dalam kaitan dengan praktik pemasaran di industri tembakau perlu dicermati potensi terjadinya *Greenwashing*. Langkah tersebut digunakan untuk meningkatkan penjualan produk dan mengalihkan perhatian publik dari praktik mereka yang merusak lingkungan dan sosial. Pelaporan atas dampak positif dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pendanaan proyek, berfungsi untuk "greenwashing" perusahaan tembakau, dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan industri tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan lingkungan (Elizabeth A. Smith, 2023)

1.2 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengungkapan dalam laporan keberlanjutan atau *sustainability report* oleh perusahaan rokok Indonesia sesuai dengan standar SASB, dengan fokus pada kesehatan masyarakat dan praktik pemasaran.
2. Membandingkan pengungkapan ESG dalam *sustainability report* (SR) antara PT Gudang Garam Tbk, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, British American Tobacco plc, dan Philip Morris International, Inc. Perbandingan pengungkapan dalam SR antara 2 perusahaan publik di Indonesia dan 2 *Transnational Tobacco Companies (TTCs)*
3. Mengidentifikasi potensi *greenwashing* dalam pengungkapan *sustainability report* perusahaan rokok, khususnya terkait klaim kesehatan publik dan pemasaran yang menyesatkan

1.3 Kerangka Teori

1. SASB Standards: Menyediakan kerangka pengukuran yang sesuai untuk pengungkapan material dalam laporan keberlanjutan bagi sektor industri tembakau.
2. ESG Framework: Memperjelas pentingnya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam akuntabilitas dan transparansi perusahaan.
3. Akuntabilitas Sosial: Menekankan pada pengungkapan yang jujur dan baik dalam mendukung tanggung jawab sosial perusahaan dan kesejahteraan publik.

1.4 Kajian Teori

1.4.1 Tantangan Keberlanjutan Industri Tembakau.

Industri tembakau menghadapi tantangan keberlanjutan yang signifikan karena dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaporkan jutaan kematian setiap tahun akibat konsumsi tembakau (WHO Newsroom, n.d.). Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai regulasi untuk mengurangi konsumsi tembakau, namun konsumsi tembakau masih tinggi. Regulasi yang menekan industri tembakau sebagai berikut:

- Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2016). Kebijakan KTR di beberapa daerah di Indonesia masih belum efektif dalam menekan konsumsi hasil industri tembakau. Hal ini disebabkan KTR hanya di wilayah perkotaan saja, sementara di pedesaan dengan prevalensi perokok yang lebih besar, belum ada KTR. (Rahajeng, 2016).
- Pemberlakuan cukai tinggi. Pengenaan cukai terutama untuk mengurangi konsumsi sesuai dengan UU Cukai, dalam hal ini pengurangan konsumsi tembakau. (Kemenkeu.go.id, 2022; TEMPO Publishing, 2020). Walaupun tarif cukai rokok meningkat namun konsumsi rokok tidak menunjukkan penurunan (Azizatun Nafi, 2021; Makarim & Purwana, 2022)
- Pembatasan iklan produk tembakau dan rokok elektronik dengan Peraturan Pemerintah No 28/2024. Pembatasan atas iklan produk tembakau dalam pelaksanaan masih ada pelanggaran dari sisi etika bisnis. (Fida Ismail & Cahyo Nugroho, 2024; Klaudia et al., 2022)

Sampai tahun 2024 ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC), sebuah perjanjian internasional yang dirancang WHO untuk membentuk aturan global atas pengendalian tembakau (Indriastuti et al., 2022). Produksi tembakau di Indonesia juga terus meningkat, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan (lihat tabel 1&2 di atas). Ratifikasi FCTC bagi Indonesia, seharusnya bisa menjadi payung bagi penerapan kebijakan pengendalian konsumsi tembakau yang lebih efektif, dan menjadi faktor yang akan memberikan benefit dari sisi kesehatan masyarakat dan ekonomi (Ahsan et al., 2022; Ylitörmänen et al., 2023)

1.4.2. Kerangka Pelaporan Keberlanjutan SASB dan Relevansi untuk Industri Tembakau.

Standar Akuntansi Keberlanjutan Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB) menawarkan kerangka pelaporan yang berfokus pada informasi material bagi investor (Parfitt, 2024). Standar ini, yang kini di bawah naungan International Sustainability Standards Board (ISSB), memiliki standar khusus untuk industri tembakau yang mencakup aspek-aspek material seperti kesehatan masyarakat dan praktik pemasaran (ISSB IFRS Foundation, 2023).

Penerapan SASB di industri tembakau bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait dampak kesehatan dan lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan ini telah secara drastis menurunkan penggunaan tembakau di banyak negara. Produsen tembakau mulai memperkenalkan berbagai produk 'pengurangan bahaya', seperti **produk nikotin non-tembakau** dan **tembakau yang dipanaskan**, dengan tujuan mengurangi dampak kesehatan dari penggunaan tembakau sambil memasuki pasar baru. (ISSB IFRS Foundation, 2023).

Labeling dan pemasaran produk tembakau diatur secara ketat di tingkat internasional (WHO FCTC). Pemasaran untuk produk yang dapat dibakar (*combustible*) dan produk non-bakar (*non-combustible*) baru harus menyeimbangkan antara persyaratan regulasi dengan kebutuhan untuk menjangkau pasar baru. Kegagalan dalam mengelola dampak sosial negatif dengan efektif dapat mengakibatkan regulasi yang lebih tidak menguntungkan dan dapat merusak izin sosial industri untuk beroperasi. Entitas yang berhasil mengelola isu ini dengan baik dapat menghindari biaya ekstra, mempertahankan pangsa pasar, dan mengurangi kewajiban kontinjensi. Penting untuk menjelaskan lebih detail tentang standar SASB yang relevan dengan industri tembakau, seperti pengungkapan risiko kesehatan, praktik pemasaran, dan rantai pasokan (ISSB IFRS Foundation, 2023).

Sustainability dibangun dengan kerangka teoretis berdasarkan integrasi dari tiga teori: teori pemangku kepentingan, teori legitimasi, dan teori politik-ekonomi. Sementara kerangka kerja standar SASB lebih berfokus pada sisi ekonomi, hal ini membuat perhatian hanya kepada sebagian stakeholder, yaitu kepada investor dan pelaku pasar. (Ali et al., 2023; Buallay, 2022).

1.4.3. Analisis ESG dan Risiko dalam Industri Tembakau.

Analisis ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) digunakan dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan. Rating risiko ESG dari lembaga seperti Sustainalytics, MSCI, FTSE dan Bloomberg memberikan indikator penting tentang eksposur perusahaan terhadap berbagai risiko keberlanjutan, termasuk risiko terkait dengan kesehatan masyarakat dan praktik pemasaran (Von Münchhausen et al., 2024). Perusahaan tembakau dengan rating risiko ESG yang tinggi mungkin menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan mereka.

Penelitian pada analisis ESG di HM Sampoerna, menunjukkan bahwa strategi ESG sudah komprehensif dan berfokus pada pemangku kepentingan. Strategi tersebut didasarkan pada penilaian materialitas yang menunjukkan prioritas yang berbeda dengan induk perusahaan, Philip Morris International (PMI). Namun, Sampoerna belum mengimplementasikan atau membuat Indeks dan Peta Jalan Keberlanjutan atau ESG sendiri, yang telah dilakukan oleh induk perusahaan. Hal ini penting untuk memantau laporan dan memastikan transparansi. Indeks dan Peta Jalan tersebut dapat diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap bisnis, dan selanjutnya dilacak dengan persentase kemajuan berdasarkan tujuan atau KPI yang terkait. (Muthiah & Anggoro, 2024).

Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perusahaan multinasional tembakau dalam penelitian, menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan (IK) untuk perusahaan-perusahaan ini tetap sulit untuk dievaluasi. Kesulitan ini berasal dari karakteristik unik industri, yang menyulitkan penilaian mengenai bagaimana perusahaan tembakau beroperasi dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan industri tembakau. Dibutuhkan indikator keberlanjutan yang komprehensif dan terstandarisasi dalam industri tembakau, agar memungkinkan penilaian dan perbandingan yang bermakna. Menghargai indikator-indikator ini tidak hanya akan mendukung transparansi, tetapi juga mendorong perusahaan tembakau untuk mengadopsi praktik yang lebih bertanggung jawab. (Nara et al., 2019)

1.4.4. Greenwashing dan Praktik Pemasaran Industri Tembakau.

Penggunaan istilah *greenwash* yang umum merujuk pada praktik komunikasi yang menyesatkan publik dengan mengadopsi citra positif terkait kinerja lingkungan atau praktik sosial dari sebuah organisasi. Dalam *The Concise Oxford English Dictionary* (Edisi ke-10), istilah ini didefinisikan sebagai: "Disinformasi disebarkan oleh organisasi yang bertujuan untuk memperlihatkan dirinya sebagai berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan, tetapi

sebenarnya menyesatkan." Semua definisi ini menekankan bahwa greenwash merupakan fenomena komunikasi yang menyesatkan (*ethical issues*), di mana organisasi berusaha meyakinkan publik bahwa mereka memiliki keyakinan positif terkait kinerja lingkungan, mandatory atau voluntary dalam pengungkapan CSR secara transparan. (Lyon & Montgomery, 2015; Vollero, 2022)

Praktik greenwashing sering dilakukan di industri tembakau, yaitu perusahaan membuat klaim yang menyesatkan tentang keberlanjutan mereka untuk mengalihkan perhatian dari dampak negatif produk mereka (Curtis File, 2024; Vollero, 2022). Smith (2023) meneliti isu greenwashing di industri tembakau dan menemukan bahwa perusahaan sering kali menekankan inisiatif lingkungan yang kecil sambil mengabaikan dampak kesehatan masyarakat yang jauh lebih besar. Penelitian Maria et al. (2024) juga membahas motivasi di balik greenwashing, seringkali karena kendala finansial. Analisis laporan keberlanjutan perlu memperhatikan potensi greenwashing dalam klaim pemasaran dan strategi keberlanjutan.

Mempengaruhi persepsi publik merupakan cara dimana perusahaan tembakau transnasional (TTC) memiliki sejarah panjang dalam memanfaatkan narasi untuk mencapai ambisi komersial mereka. Jangkauan global narasi perusahaan-perusahaan ini telah dikenal sebagai tantangan dalam menghadapi masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh tembakau. Baik BAT maupun PMI memiliki operasi di Indonesia yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama (Bentoel) dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (Sampoerna). (Freeman et al., 2022; Greenland et al., 2021; Greenwashing, Tobacco Tactics, updated 12 July 2022, accessed 28 December 2024.; Houghton et al., 2019; Marshall et al., 2023)

Sampoerna, anak perusahaan PMI, mengoperasikan program CSR yang berfokus pada lingkungan melalui inisiatif "Bantu Indonesia Sehat." Program ini, yang dimulai pada tahun 2018, berkolaborasi dengan Institut Peranian Bogor (IPB) dan Badan Pertanian Nasional (BPTP) untuk mendaur ulang limbah hasil produksi menjadi pupuk organik. Menurut laporan, "Pada tahun 2018, proyek ini berhasil mendaur ulang limbah senilai 520 juta rupiah dari program Sampoerna yang sejalan dengan kepentingan konsumen." Perusahaan ini memiliki pengakuan nasional dan internasional untuk program-program tersebut, seperti Program Penilaian Kinerja Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, serta award dari Global Green Award 2022. Namun, Human Rights Watch (HRW) dalam laporan mereka terkait anak-anak di industri tembakau di Indonesia menyebutkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam produksi tembakau mengalami gejala terkait paparan nikotin. HRW menyimpulkan bahwa "perusahaan-perusahaan tersebut tidak cukup melakukan tindakan untuk mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan berbahaya tersebut." (Greenwashing, Tobacco Tactics, updated 12 July 2022, accessed 28 December 2024.-Tobacco Tactics, n.d.)

1.5 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, berikut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, dalam menilai kualitas transparansi, mencari bukti greenwashing dalam laporan dan membandingkan kinerja Perusahaan dengan rating risiko yang berbeda (menggunakan *sustainanalytics*) :

- H1:** Terdapat hubungan positif antara tingkat transparansi mengenai dampak negatif kesehatan produk tembakau dan kepatuhan terhadap standar pengungkapan SASB dalam laporan keberlanjutan perusahaan tembakau Indonesia.
- H2:** Terdapat korelasi negatif antara peringkat risiko ESG perusahaan tembakau Indonesia dan kualitas pengungkapan informasi mengenai risiko kesehatan dalam laporan keberlanjutan mereka sesuai standar SASB.

H3: Perusahaan tembakau Indonesia yang menunjukkan indikasi greenwashing dalam laporan keberlanjutan mereka, akan memiliki skor kepatuhan SASB yang lebih rendah (ESG Risk Rating)

2. METODOLOGI

1. *Content analysis* digunakan sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis komunikasi dalam bentuk teks atau media lain untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengidentifikasi pola tertentu (Uma Sekaran and Roger Bougie, 2019). Mengumpulkan dan menganalisis sustainability report terbaru (2023) dari PT Gudang Garam Tbk, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, British American Tobacco plc, dan Philip Morris International, Inc.
2. Menggunakan kriteria SASB untuk mengevaluasi pengungkapan terkait kesehatan masyarakat dan pemasaran, menekankan elemen-elemen ESG yang relevan.
3. Membandingkan kinerja laporan antar perusahaan untuk mengidentifikasi *best practices* serta kesenjangan dalam pengungkapan. Menyediakan kerangka pengukuran yang sesuai untuk pengungkapan material dalam laporan keberlanjutan bagi sektor industri tembakau.

2.1 Analisis Data

1. Evaluasi Kualitas Pengungkapan dengan menggunakan teknik analisis isi untuk menilai kualitas dan ketepatan pengungkapan dalam sustainability report tahun 2023 sesuai dengan standar SASB.

Tabel 1. Topik dan Metrik Pengungkapan Keberlanjutan

SUSTAINABILITY DISCLOSURE TOPICS & METRICS

Table 1. Sustainability Disclosure Topics & Metrics

TOPIC	METRIC	CATEGORY	UNIT OF MEASURE	CODE
Public Health	(1) Gross revenue and (2) revenue net of excise taxes from (a) non-tobacco nicotine products and (b) heated tobacco products	Quantitative	Presentation currency	FB-TB-260a.1
	Discussion of the process to assess risks and opportunities associated with 'tobacco harm reduction' products	Discussion and Analysis	n/a	FB-TB-260a.2
Marketing Practices	Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated with marketing, labelling, or advertising practices ¹	Quantitative	Presentation currency	FB-TB-270a.1
	Description of the entity's marketing policy and relevant positions on Articles 11 and 13 of the World Health Organisation Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)	Discussion and Analysis	n/a	FB-TB-270a.2

Table 2. Activity Metrics

ACTIVITY METRIC	CATEGORY	UNIT OF MEASURE	CODE
Combustible tobacco product sales volume: (1) cigarette, (2) cigar, and (3) other smoked tobacco products ²	Quantitative	Number, Metric tonnes (t)	FB-TB-000.A
Non-combustible product sales volume: (1) traditional smokeless tobacco, (2) non-tobacco nicotine products, (3) heated tobacco products, and (4) nicotine replacement therapy products ³	Quantitative	Number	FB-TB-000.B

Sumber: (ISSB IFRS Foundation, 2023)

2. Analisis Kualitatif dengan mengidentifikasi elemen *greenwashing* menggunakan pendekatan analisis diskursus untuk mengeksplorasi bagaimana narasi dalam laporan dapat menyedatkan pemangku kepentingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ruang Lingkup Laporan Keberlanjutan Pada Industri Tembakau

Pada 2022, Euromonitor International memperkirakan nilai pasar tembakau Indonesia mencapai lebih dari US\$34 miliar, menjadikannya sebagai pasar rokok terbesar kedua di dunia. Pemimpin pasar adalah PT Gudang Garam Tbk (Gudang Garam) yang menguasai hampir sepertiga pasar, diikuti oleh Philip Morris International (PMI) sebagai pesaing terdekat dengan pangsa yang sedikit lebih kecil. PMI beroperasi di Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Philip Morris Indonesia dan PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna), yang diakuisisi pada tahun 2005. PT Djarum (Djarum) berada di posisi ketiga dengan pangsa pasar sekitar setengah dari dua perusahaan teratas. Selain PMI, perusahaan tembakau multinasional lainnya juga berusaha memperluas kehadirannya di Indonesia, seperti British American Tobacco (BAT) yang membeli 85% saham PT Bentoel Internasional Investama Tbk (Bentoel) pada tahun 2009, yang saat itu merupakan perusahaan tembakau terbesar keempat di Indonesia. PT Djarum bukan perusahaan publik sehingga tidak masuk dalam pembahasan.

Laporan keberlanjutan yang dibahas pada penelitian ini merujuk pada Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keberlanjutan mulai periode laporan tahun 2020, termasuk perusahaan dalam industri tembakau yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi atas perusahaan publik yang tidak mematuhi ketentuan pelaporan keberlanjutan sesuai dengan pasal 15, berupa sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan publik yang tidak memenuhi kewajibannya, termasuk denda. Pasal 16, menentukan prosedur dan jenis sanksi yang dapat diberikan oleh OJK.

Perusahaan dalam industri tembakau yang tercatat di BEI ada 5 : PT Gudang Garam Tbk – GGRM, PT H.M. Sampoerna Tbk – HMSP, PT Indonesian Tobacco Tbk – ITIC, PT Wismilak Inti Makmur Tbk – WIIM, dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk – RMBA mulai 16 Januari 2024 delisting dari BEI (Ibad Durrohman-Bisnis Indonesia, 2024)

Tabel 2. Laporan Keberlanjutan Perusahaan Rokok di BEI

Ketersediaan Laporan Keberlanjutan di BEI

No	Nama Perusahaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	GGRM	*	*	*	*	v	v	v
2	HMSP	*	*	*	*	v	v	v
3	WIIM	*	*	v	v	v	v	v
4	ITIC	*	*	*	*	v	v	v
5	RMBA	*	*	*	*	*	*	*

* Belum ada laporan v Sudah Ada laporan

Sumber : Data Olahan Laporan Keberlanjutan BEI

Dari data ketersediaan laporan keberlanjutan di BEI, PT Wismilak Inti Makmur Tbk sudah menyusun mulai tahun 2019 sampai 2023. PT Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) adalah produsen tembakau yang mengkhususkan diri dalam tembakau iris (tembakau gulung/gulung sendiri). Laporan berkelanjutan PT ITIC mulai tahun 2021 sampai dengan 2023. Sedangkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk belum ada laporan keberlanjutan sampai delisting dari BEI tahun 2024.

Penyajian laporan berkelanjutan antara 2 perusahaan publik, di industri tembakau, dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP) (Statista, 2024). Laporan berkelanjutan dari dua perusahaan di Indonesia tersebut dibandingkan dengan 2 perusahaan market leader pada industry tembakau di dunia, British American Tobacco plc (BAT), dan Philip Morris International, Inc (PMI). BAT tercatat di *London Stock Exchange* (LSE) dan PMI terdaftar di *New York Stock Exchange* (NYSE). Dari 4 perusahaan tersebut akan dilihat pengungkapan yang dilakukan pada laporan sustainability tahun 2023, dengan menggunakan standar SASB.

3.2. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Sesuai Standar SASB

IFRS S1 mengharuskan entitas untuk merujuk dan mempertimbangkan penerapan metrik dalam Standar SASB saat menentukan informasi apa yang akan diungkapkan terkait risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Standar ini berlaku bagi semua entitas untuk periode tahunan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan ini diizinkan untuk semua entitas (ISSB IFRS Foundation (2023)). Dari 77 industri yang diatur dalam standar SASB, Industri tembakau masuk Sektor Makanan dan Minuman, terdapat dua topik utama yang harus diungkapkan untuk industri tembakau yaitu kesehatan publik dan praktik pemasaran. Beberapa poin penting terkait dua topik tersebut adalah :

1. Pengungkapan Kinerja Keberlanjutan

SASB menetapkan standar yang mengharuskan perusahaan tembakau untuk mengungkapkan informasi terkait dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka. Ini membantu pemangku kepentingan memahami bagaimana perusahaan beroperasi dan dampak yang ditimbulkan oleh bisnis mereka.

2. Risiko dan Peluang

Dalam konteks industri tembakau, SASB memfokuskan pada risiko yang berkaitan dengan kesehatan publik, peraturan, dan perubahan preferensi konsumen terhadap produk tembakau. Standar ini juga mendorong perusahaan untuk mengeksplorasi peluang dalam pengembangan produk alternatif yang lebih berkelanjutan.

3. Pengelolaan Rantai Pasokan

SASB menekankan pentingnya transparansi dalam rantai pasokan industri tembakau, termasuk praktik petani dan produsen. Standar ini mendorong perusahaan untuk memastikan praktik yang etis dan berkelanjutan di seluruh rantai.

4. Pengaruh Sosial dan Kesehatan

Industri tembakau menghadapi banyak kritik terkait dampak kesehatan dari produk mereka. SASB mengharuskan pengungkapan tentang usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

5. Keselarasan dengan Tujuan Keberlanjutan Global

Dengan mengikuti standar SASB, perusahaan tembakau dapat berkontribusi pada tujuan keberlanjutan global seperti SDGs (*Sustainable Development Goals*) melalui praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

3.3 Laporan Keberlanjutan PT Gudang Garam Tbk

Tema kesehatan masyarakat belum dibahas secara spesifik pada laporan keberlanjutan PT Gudang Garam Tbk tahun 2023. Kesehatan masyarakat secara implisit terintegrasi ke dalam diskusi tentang pengembangan produk, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan lingkungan.

Kebijakan pemasaran perusahaan, dalam laporan tersebut disampaikan, mematuhi peraturan yang relevan dan semangat WHO FCTC, namun tidak secara eksplisit membahas posisi perusahaan pada Pasal 11 dan 13 dari Konvensi Kerangka Kerja. Ketiadaan rincian ini

membuat mustahil untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan. Laporan tersebut juga belum menyebutkan ada tidaknya kerugian finansial yang timbul akibat masalah hukum.

Laporan tersebut menyebutkan alternatif untuk rokok, seperti produk tembakau yang dipanaskan (*heated tobacco products-HTPs*) dan produk e-vapor. Pembahasan tentang alternatif ini, meskipun berfokus pada tren pasar dan faktor ekonomi, secara tidak langsung berhubungan dengan kesehatan masyarakat dengan mengakui keberadaan dan lanskap regulasi yang berkembang di sekitar produk berisiko rendah.

PT Gudang Garam Tbk

Topic		Metric	Category
Table 1	Public Health	Gross Revenue	ada
		Revenue Nett Of Excise Taxes	Non tobacco nicotine product (ada secara keseluruhan)
			Heated (ada secara keseluruhan)
	Diskusi risiko dan kesempatan pengurangan bahaya:	tidak ada	
	Marketing Practice	Kerugian Moneter	tidak ada
Kebijakan Pemasaran		tidak ada	
Table 2	Volume Penjualan	Produk Tembakau Bakar	hanya ada volume produksi rokok
		Tembakau tidak bakar	tidak ada

Gambar 3. Laporan Keberlanjutan PT Gudang Garam Tbk

3.4 Laporan Keberlanjutan PT HM Sampoerna Tbk

Laporan Keberlanjutan PT HM Sampoerna Tbk tahun 2023, terdapat bagian tentang kesehatan masyarakat, meskipun secara tidak langsung dan dibahas dalam konteks pengelolaan dampak sosial produk mereka. Laporan tersebut tidak secara langsung menyajikan data atau statistik kesehatan masyarakat, tetapi fokusnya pada praktik pemasaran yang bertanggung jawab dan pengembangan produk berisiko rendah. Hal ini telah menunjukkan adanya kesadaran akan masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan tembakau. Akan tetapi, tidak ada data spesifik atau analisis komprehensif tentang implikasi kesehatan masyarakat

Laporan tersebut menyampaikan komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait pemasaran, penjualan, dan komunikasi produk tembakau. Hal ini termasuk mencegah akses ke produk tembakau oleh anak di bawah umur 18 tahun, berbagai inisiatif, program pendidikan, dan kolaborasi dengan mitra ritel.

Sampoerna menyebutkan keterlibatan dalam mengembangkan dan memperkenalkan produk bebas asap (*Smoke Free Product-SFP*), yang menekankan bahwa produk ini, meskipun tidak sepenuhnya bebas risiko, secara ilmiah terbukti kurang berbahaya daripada rokok tradisional. Laporan tersebut menyajikan nilai investasi dalam memberikan fasilitas penelitian dan produksi yang didedikasikan untuk alternatif ini.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Topic		Metric	Category
Table 1	Public Health	Gross Revenue	tidak ada data
		Revenue Nett Of Excise Taxes	tidak ada data
			tidak ada data
	Diskusi risiko dan kesempatan pengurangan bahaya:	data ada, dengan pembahasan terbatas	
	Marketing Practice	Kerugian Moneter	Tidak disebutkan data secara spesifik.
Kebijakan Pemasaran		ada dengan referensi WHO FCTC. tidak spesifik.	
Table 2	Volume Penjualan	Produk Tembakau Bakar	tidak ada data
		Tembakau tidak bakar	tidak ada data

Gambar 4. Laporan Keberlanjutan PT HM Sampoerna Tbk

3.5 Laporan Keberlanjutan Philip Morris International inc. (PMI)

Dokumen laporan keberlanjutan PMI tidak memberikan presentasi kuantitatif dari pendapatan kotor dan pendapatan bersih (setelah pajak cukai) yang secara khusus dipecah berdasarkan produk nikotin non-tembakau dan produk tembakau yang dipanaskan. Meskipun disebutkan bahwa produk bebas asap menyumbang sekitar 37% dari total pendapatan bersih PMI tahun 2023 dan memberikan beberapa data tentang volume penjualan dan pengguna produk bebas asap, namun perincian yang tepat berdasarkan jenis produk dan mata uang tidak tersedia dalam laporan ini.

Dalam laporan tersebut, PMI tidak menyampaikan data kuantitatif tentang kerugian moneter dari tindakan hukum terkait pemasaran, pelabelan, atau periklanan yang ada dalam dokumen. Meskipun laporan tersebut membahas praktik pemasaran yang bertanggung jawab dan komitmen perusahaan untuk mencegah akses kaum muda, namun laporan tersebut tidak secara eksplisit merinci kebijakan pemasarannya secara lengkap atau secara langsung membahas pendiriannya pada Pasal 11 dan 13 WHO FCTC. Dokumen tersebut menyebutkan kepatuhan terhadap kode dan peraturan pemasaran tetapi tidak memberikan teks lengkap dari kode atau analisis terperinci.

PMI telah berinvestasi sebesar USD 12,5 miliar secara kumulatif sejak 2008, untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara ilmiah membuktikan berkurangnya potensi bahaya dari produk bebas asapnya dibandingkan dengan rokok. Upaya yang dilakukan termasuk uji coba praklinis dan klinis, studi perilaku, dan pengawasan pasca pemasaran. Hasil penelitian telah dipublikasikan dalam jurnal yang ditinjau sejawat dan dibagikan secara terbuka.

Philip Morris International, Inc

Topic	Metric	Category	
Table 1	Public Health	Gross Revenue	ada
		Revenue Nett Of Excise Taxes	Non tobacco nicotine product (tidak ada rincian)
			Heated (tidak ada)
	Diskusi risiko dan kesempatan pengurangan bahaya:	Ada, dibahas dalam konteks transformasi bisnis mereka menuju smoke-free products dan upaya pengurangan dampak negatif dari produk tembakau. Serta pengembangan produk smoke-free	
	Marketing Practice	Kerugian Moneter	Tidak ada
Kebijakan Pemasaran		ada	
Table 2	Volume Penjualan	Produk Tembakau Bakar	ada
		Tembakau tidak bakar	ada

Gambar 5. Laporan Keberlanjutan Philip Morris International inc. (PMI)

3.6 Laporan Keberlanjutan British American Tobacco plc. (BAT)

Berdasarkan laporan, terdapat informasi yang terkait dengan kesehatan masyarakat dalam konteks pengurangan bahaya tembakau. Laporan keberlanjutan BAT menyajikan pendapatan kotor dan pendapatan bersih (setelah pajak cukai) untuk produk nikotin non-tembakau dan produk tembakau yang dipanaskan. Angka keuangan tertentu disertakan dalam dokumen tetapi tidak ditampilkan secara spesifik. Data yang disajikan berfokus pada kinerja keuangan BAT terkait produk-produk ini. Akan tetapi, data penilaian yang lengkap dan tidak bias terhadap implikasi kesehatan masyarakat tidak ada.

Jumlah total kerugian moneter akibat proses hukum yang terkait dengan pemasaran, pelabelan, dan periklanan telah dilaporkan. Mata uang spesifik yang digunakan untuk data keuangan ini telah disebutkan, akan tetapi tidak ditampilkan secara detail dalam laporan.

Laporan sudah mengungkapkan kebijakan pemasaran entitas (BAT) dan pendiriannya terhadap Pasal 11 dan 13 dari Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC).

British American Tobacco plc

Topic	Metric	Category	
Table 1	Public Health	Gross Revenue	ada dan spesifik
		Revenue Nett Of Excise Taxes	Non tobacco nicotine product (spesifik)
			Heated (ada dan spesifik)
	Diskusi risiko dan kesempatan pengurangan bahaya:	Ada: -Target "50 million consumers of non-combustible products by 2030" -Research on risks of non-combustible products -Publikasi peer-reviewed articles (198 artikel)	
	Marketing Practice	Kerugian Moneter	Ada, 3 kasus yang mendapatkan penalty.
Kebijakan Pemasaran		ada	
Table 2	Volume Penjualan	Produk Tembakau Bakar	ada
		Tembakau tidak bakar	ada

Gambar 6. Laporan Keberlanjutan British American Tobacco plc. (BAT)

3.7 Hubungan positif antara tingkat transparansi dan standar pengungkapan SASB.

Hasil analisis di atas menunjukkan gambaran yang beragam diantara 4 laporan keberlanjutan yang diteliti. Tidak cukup informasi untuk secara pasti mengkonfirmasi atau menolak hipotesis (**H1**: Terdapat hubungan positif antara tingkat transparansi mengenai dampak negatif kesehatan produk tembakau dan kepatuhan terhadap standar pengungkapan SASB dalam laporan keberlanjutan perusahaan tembakau Indonesia). Beberapa temuan dari pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut sebagai berikut :

- **Kurangnya Transparansi yang Konsisten:** Laporan dari PT Gudang Garam, PT HM Sampoerna, dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna menunjukkan berbagai tingkat transparansi mengenai dampak negatif kesehatan produk tembakau. Meskipun beberapa mengakui kekhawatiran terhadap risiko kesehatan, tidak ada yang memberikan data atau analisis komprehensif mengenai implikasi kesehatan produk mereka. Data spesifik mengenai dampak finansial dari tuntutan hukum terkait kesehatan masih kurang.
- **Kepatuhan Sebagian terhadap Standar SASB:** Semua perusahaan yang disebutkan menunjukkan beberapa tingkat kepatuhan terhadap standar SASB tertentu, terutama mengenai faktor ESG dan transparansi rantai pasokan. Namun, kedalaman dan kelengkapan pengungkapan mereka mengenai dampak kesehatan sangat bervariasi.
- **Penekanan pada Produk Alternatif:** Beberapa perusahaan menyoroti investasi dan pengembangan produk dengan risiko rendah (seperti produk tembakau yang dipanaskan), menunjukkan upaya untuk mengatasi kekhawatiran kesehatan. Namun, sejauh mana hal ini merupakan respons terhadap kebutuhan transparansi yang lebih tinggi mengenai dampak negatif kesehatan produk tradisional mereka dibandingkan dengan strategi bisnis semata masih belum jelas.
- **Keterbatasan Data:** Analisis ini terbatas oleh informasi yang tersedia dalam laporan keberlanjutan. Laporan seringkali kekurangan data kuantitatif yang detail mengenai dampak kesehatan dan konsekuensi finansial.

3.8 Perbandingan Nilai ESG oleh Sustainalytics tahun 2023

Tabel 2. ESG Risk Rating

Nama Perusahaan	ESG Risk Rating		Industry Group	Global
Philip Morris International Plc.	24.8	Medium	89 out of 569	7.469 out of 15.035
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	27.3	Medium	147 out of 569	9.057 out of 15.035
British American Tobacco plc.	30.3	High Risk	209 out of 569	10.792 out of 15.035
PT Gudang Garam Tbk	43.6	Severe Risk	493 out of 569	14.296 out of 15.035

Sumber: MorningStar, Sustainalytics
<https://www.sustainalytics.com/esg-rating>

Laporan keberlanjutan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dilakukan penilaian oleh Morningstar Sustainalytics, yang melakukan rating juga untuk 2 perusahaan rokok global (PMI & BAT). Sustainalytics memberikan penilaian risiko ESG untuk banyak perusahaan di seluruh dunia. Rating ini mencerminkan eksposur suatu perusahaan terhadap risiko ESG tertentu dan sejauh mana perusahaan tersebut mengelola risiko tersebut (Von Münchhausen et al., 2024). Dari tabel di atas bisa dilihat perbandingan nilai ESG berdasar risiko pada keempat perusahaan rokok.

1. **Philip Morris International Inc** memiliki rating risiko ESG terendah (24.8), yang menunjukkan risiko sedang. Hal ini berarti bahwa perusahaan dianggap lebih baik dalam hal praktik ESG dibandingkan dengan yang lain.

2. **PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk** juga berada dalam kategori risiko sedang dengan rating 27.3, tetapi peringkatnya lebih rendah di industri dan global dibandingkan dengan Philip Morris.
3. **British American Tobacco plc.** memiliki rating 30.3, atau berada dalam kategori risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berpotensi menghadapi lebih banyak risiko terkait ESG dibandingkan dengan dua perusahaan sebelumnya.
4. **PT Gudang Garam Tbk** memiliki rating tertinggi (43.6) yang menunjukkan risiko parah. Hal ini berarti bahwa perusahaan ini mungkin memiliki tantangan yang lebih besar dalam hal praktik ESG, yang bisa berdampak negatif pada reputasi dan kinerja jangka panjang.

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam rating risiko ESG di antara perusahaan-perusahaan rokok tersebut. Rating risiko ESG ini penting karena dapat memengaruhi keputusan investasi dan persepsi publik terhadap perusahaan. Perusahaan dengan rating yang lebih rendah cenderung dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial dan lebih stabil dari segi risiko. Industri tembakau dalam hal ini, perusahaan rokok mendapatkan nilai ESG risk rating menengah sampai dengan *severe risk* dibanding group lain di sektor industri makanan dan minuman.

3.9 Korelasi Negatif antara Peringkat Risiko ESG Perusahaan Tembakau Indonesia dan Kualitas Pengungkapan Informasi

Terdapat indikasi yang mendukung hipotesis H2 (Terdapat korelasi negatif antara peringkat risiko ESG perusahaan tembakau Indonesia dan kualitas pengungkapan informasi mengenai risiko kesehatan dalam laporan keberlanjutan mereka sesuai standar SASB). Data menunjukkan korelasi negatif antara peringkat risiko ESG dan peringkat risiko Kesehatan. Perusahaan dengan peringkat risiko ESG yang lebih rendah (Philip Morris dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna) memiliki peringkat risiko yang lebih rendah (sedang), sedangkan perusahaan dengan peringkat risiko ESG yang lebih tinggi (British American Tobacco dan PT Gudang Garam) memiliki peringkat risiko yang lebih tinggi (tinggi dan parah)

Namun analisis ini terbatas pada data peringkat risiko ESG dari Sustainalytics dan tidak secara langsung mengukur kualitas pengungkapan risiko kesehatan dalam laporan keberlanjutan. Meskipun terdapat korelasi negatif yang terlihat, ini tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Faktor lain mungkin berkontribusi pada peringkat risiko ESG dan kualitas pengungkapan risiko Kesehatan.

3.10 Identifikasi Elemen *Greenwashing* Pada Laporan Keberlanjutan

"*Greenwashing*" mengacu pada praktik yang digunakan oleh industri-industri yang kontroversial untuk memasarkan produk dan atau citra mereka sebagai ramah lingkungan dalam upaya untuk meningkatkan penjualan dan mengalihkan perhatian publik dari praktik yang merugikan lingkungan. Pelaporan dampak lingkungan dan pendanaan proyek serta organisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bersifat lingkungan berfungsi untuk "*greenwash*" perusahaan rokok, serta mengalihkan perhatian dari bahaya yang ditimbulkan oleh industri terhadap lingkungan dan kesehatan lingkungan. (Curtis File, 2024; europeanlung.org, 2023; Maria et al., 2024; Voller, 2022) Industri tembakau di dunia menghadapi pengawasan ketat dari segi kesehatan dan lingkungan karena dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks *greenwashing*, beberapa hal yang perlu dianalisis terkait pengungkapan laporan keberlanjutan adalah sebagai berikut :

- Keberlanjutan Kesehatan

Industri tembakau mungkin menyajikan komitmen CSR atau proyek lingkungan sementara mengabaikan dampak kesehatan publik dari produk mereka, yang merupakan kritikan utama terkait dengan praktik *greenwashing*.

- **Pengalihan Fokus**
Laporan keberlanjutan mungkin digunakan untuk mengalihkan perhatian dari dampak kesehatan negatif dengan menyoroti inisiatif hijau seperti pengurangan emisi dalam proses manufaktur atau pelestarian lingkungan dalam skala terbatas.
- **Legalitas dan Pengawasan Publik**
Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, adanya peraturan yang memerlukan informasi keberlanjutan dapat mendorong praktik *greenwashing* jika perusahaan tidak mengikutinya dengan komitmen nyata dan mendasar terhadap perubahan yang positif.

Adanya potensi *greenwashing* dalam pengungkapan laporan keberlanjutan dari 4 perusahaan rokok dalam penelitian ini, sebenarnya dapat dilihat dari laporan praktik pemasaran. Namun untuk menentukan adanya indikasi *greenwashing*, dibutuhkan penjelasan kebijakan pemasaran lengkap dan informasi keuangan yang detail. Analisis menyeluruh dari seluruh laporan keberlanjutan diperlukan untuk mendeteksi apakah ada pernyataan atau klaim yang menyesatkan.

Berdasarkan laporan keberlanjutan tentang praktik pemasaran, keempat perusahaan telah menyampaikan dalam laporan, namun tidak ada penjelasan terperinci. Laporan tersebut menyebutkan komitmen perusahaan untuk mematuhi peraturan mengenai pemasaran kepada konsumen dewasa dan mencegah akses oleh anak di bawah umur. Laporan tersebut juga menyinggung kebijakan pemasaran dan keselarasannya dengan pasal-pasal WHO FCTC, tetapi rincian kebijakan tersebut tidak tersedia dalam teks yang tersedia.

Oleh karena tidak terdapat penjelasan yang rinci dan transparan terkait kesehatan masyarakat dan praktik pemasaran, maka untuk menilai secara pasti apakah *greenwashing* benar-benar terjadi tidak bisa dilakukan. Jadi hipotesis **H3**: Perusahaan tembakau Indonesia yang menunjukkan indikasi *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan mereka, akan memiliki skor kepatuhan SASB yang lebih rendah (ESG Risk Rating). Dokumen tersebut mengidentifikasi potensi *greenwashing*, tetapi tidak memberikan bukti konkret tentang adanya praktik *greenwashing* di perusahaan yang diteliti. Pernyataan tentang komitmen perusahaan terhadap praktik pemasaran yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap WHO FCTC terlalu umum dan tidak cukup spesifik untuk membuktikan atau menyangkal adanya *greenwashing*.

Dengan demikian, perlu dilakukan audit independen secara menyeluruh atas operasi perusahaan dalam laporan keberlanjutan dan analisis yang kritis atas klaim dalam laporan keberlanjutan. Akuntansi ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) lebih dari sekadar strategi untuk menciptakan citra baik atau *greenwashing*. Hal itu dilakukan dengan memetakan, mengukur, dan memberi kode terkait isu-isu sosial, lingkungan, dan politik, standar akuntansi ESG memberikan dasar teknis untuk klaim etis yang dapat menguntungkan investasi serta perlu untuk meningkatkan kompatibilitas standar pelaporan. Namun demikian, meskipun klaim etis ini ada, tidak selalu berarti bahwa akan terjadi perubahan nyata dalam operasi bisnis atau dampak sosial-ekologisnya. (Parfitt, 2024; Pizzi et al., 2024)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penerapan standar SASB pada laporan keberlanjutan di industri tembakau di Indonesia menunjukkan adanya variasi dalam kualitas dan ketepatan pengungkapan informasi, terutama

terkait dengan isu kesehatan publik dan praktik pemasaran yang bertanggung jawab. Meskipun standar SASB memberikan kerangka yang jelas bagi perusahaan untuk mengungkapkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), perusahaan rokok masih kurang transparan menyajikan dalam laporan mereka.

1. Sebagian besar laporan yang dianalisis, termasuk dari PT Gudang Garam Tbk dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, masih belum sesuai standar SASB, khususnya dalam mengungkapkan informasi yang material terkait kesehatan masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam proses pengungkapan agar dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan mendalam.
2. Laporan keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi mengandung elemen *greenwashing*, dimana informasi yang disampaikan berfokus pada inisiatif hijau atau tanggung jawab sosial tanpa memberikan gambaran lengkap tentang dampak negatif dari produk tembakau. Hal ini dapat menyesatkan pemangku kepentingan dan publik.
3. Beberapa perusahaan menunjukkan upaya untuk mengembangkan produk tembakau alternatif yang dianggap lebih aman, namun informasi yang terkandung dalam laporan perusahaan masih belum cukup untuk menyakinkan terkait pembuatan kebijakan dan praktik pemasaran yang lebih etis.
4. Meskipun perusahaan menyatakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, laporan-laporan tersebut sering kali kurang detail dan tidak memberikan analisis yang memadai tentang dampak kesehatan masyarakat dan kerugian finansial akibat masalah hukum.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak bagi perusahaan-perusahaan dalam industri tembakau untuk meningkatkan pengungkapan keberlanjutan mereka, memastikan bahwa laporan-laporan tersebut relevan, akurat, dan sesuai dengan standar SASB. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan akan lebih meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, serta mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

4.2 Implikasi

Penelitian mengenai penerapan standar SASB di industri tembakau tidak hanya memberikan wawasan baru bagi perusahaan, tetapi juga untuk pemangku kepentingan yang lebih luas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Implikasi dari penelitian ini adalah :

- Penelitian ini mendorong perusahaan rokok untuk meningkatkan praktik pengungkapan dalam laporan keberlanjutannya, dengan memberikan informasi yang lebih eksplisit dan mendalam mengenai risiko kesehatan dan dampak produk. Perusahaan harus mematuhi standar SASB untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan komprehensif dan akurat.
- Penemuan bahwa perusahaan belum memenuhi standar SASB dapat menarik perhatian pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi yang mengharuskan transparansi perusahaan dalam melaporkan dampak sosial dan lingkungan produk mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap industri tembakau.
- Perusahaan perlu menghindari *greenwashing*. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan secara terbuka kebijakan dan inisiatif yang diambil untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari produk mereka, serta melaporkan hasil nyata dari inisiatif tersebut.

4.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Analisis hanya dilakukan pada empat perusahaan, sehingga belum mencerminkan praktik di seluruh industri tembakau di Indonesia.
2. Data dari laporan keberlanjutan belum sepenuhnya mencakup semua aspek yang relevan, dan beberapa informasi yang diperlukan untuk menilai praktik pemasaran tidak tersedia.
3. Penelitian ini difokuskan pada laporan 2023, sehingga tidak mempertimbangkan perubahan yang mungkin terjadi setelah tahun tersebut dan tidak melihat trend jangka panjang.
4. Penggunaan analisis konten dan pendekatan diskursus dapat menghasilkan interpretasi yang subjektif, tergantung pada perspektif peneliti.

Dengan mempertimbangkan kesimpulan, saran, implikasi, dan keterbatasan ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang keberlanjutan di industri tembakau.

4.4 Saran

Saran terkait penerapan standar SASB untuk meningkatkan transparansi atas risiko dan peluang sebagai berikut :

1. Industri tembakau harus mengembangkan kerangka pengukuran yang jelas untuk mengidentifikasi dan melaporkan risiko meningkatkan pengungkapan tentang dampak kesehatan, mengurangi unsur greenwashing, atau meningkatkan komunikasi tentang inovasi produk tembakau alternatif yang rendah risiko. Hal ini termasuk penggunaan metrik yang sesuai dalam laporan keberlanjutan untuk menunjukkan dampak dari produk tersebut terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan pemasaran yang digunakan untuk produk alternatif jelas dan transparan, merinci bagaimana kebijakan tersebut sesuai dengan standar SASB dan praktik etis. Ini termasuk komitmen untuk tidak menargetkan konsumen muda dan memastikan bahwa informasi tentang risiko tetap tersedia.
3. Pemerintah dalam hal ini regulator perlu memberlakukan peraturan yang lebih ketat tentang pengungkapan dampak kesehatan dalam laporan keberlanjutan industri tembakau, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi standar keberlanjutan. Pemerintah perlu segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control/FCTC*) sebagai kerangka kerja yang mendorong efektifitas aturan yang sudah dibuat sebelumnya.
4. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, masyarakat, dan ahli kesehatan, dalam proses pengembangan dan evaluasi produk baru. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, survei, atau kolaborasi dalam penelitian untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait produk rendah risiko.

Dengan menerapkan saran-saran ini, perusahaan dalam industri tembakau dapat meningkatkan transparansi dalam laporan keberlanjutan mereka, mengurangi risiko *greenwashing*, dan menunjukkan komitmen nyata terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab serta berkelanjutan

5. REFERENSI

Ahsan, A., Afin, R., Amalia, N., Hindriyani, M., Jacinda, A. R., & Kramer, E. (2022). FCTC ratification, smoking prevalence, and GDP per capita: lessons for Indonesia and the rest

- Kemenkeu.go.id. (2022, November 4). *Wamenkeu: Penetapan Kebijakan Cukai Rokok Pertimbangkan Empat Aspek Penting*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/wamenkeu-penetapan-kebijakan-cukai>.
- Klaudia, S., Fatayo Widyawati, K. H., & Putranti, E. C. (2022). Analisis Pelanggaran Etika Bisnis Terhadap Penayangan Iklan Rokok Di Pertelevisian Indonesia. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 117–126. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.486>
- Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The Means and End of Greenwash. *Organization and Environment*, 28(2), 223–249. <https://doi.org/10.1177/1086026615575332>
- Makarim, M. M., & Purwana, A. S. (2022). Kenaikan Dan Penyederhanaan Tarif Cukai Untuk Menurunkan Pengeluaran Konsumsi Rokok Dan Prevalense Perokok Remaja. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 17(1), 57–78. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.9284>
- Maria, M. M. L., Zonatto, V. C. da S., Maria Júnior, E., Louzada, L. C., & Nascimento, S. P. (2024). The Practice of Green Washing Motivated by Financial Constraints: An Analysis in Global Economies. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), e06084. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-060>
- Marshall, D., Rehme, J., O'Dochartaigh, A., Kelly, S., Boojihawon, R., & Chicksand, D. (2023). Reporting controversial issues in controversial industries. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 36(9), 483–512. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4684>
- Muthiah, M., & Anggoro, Y. (2024). Implementation of ESG as a Strategy for Business Sustainability in a Public-Listed Tobacco Company in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(06). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i6-88>
- Nara, E. O. B., Gelain, C., Moraes, J. A. R., Benitez, L. B., Schaefer, J. L., & Baierle, I. C. (2019). Analysis of the sustainability reports from multinationals tobacco companies in southern Brazil. *Journal of Cleaner Production*, 232, 1093–1102. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.05.399>
- Parfitt, C. (2024). A foundation for 'ethical capital': The Sustainability Accounting Standards Board and Integrated Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102477>
- Pizzi, S., Caputo, F., & de Nuccio, E. (2024). Do sustainability reporting standards affect analysts' forecast accuracy? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 15(2). <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2023-0227>
- PwC. (2023, September 5). Trend dan arah sustainability report di masa mendatang. <https://Pwc.to/3sMdciv>.
- Rahajeng, E. (2016). Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok Di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Bali. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 14(3). <https://doi.org/10.22435/jek.v14i3.4694.238-249>
- Statista. (2024). *Tobacco industry in Indonesia*.
- TEMPO Publishing. (2020). *Aneka Cara Pemerintah Meningkatkan Pendapatan*.
- Uma Sekaran and Roger Bougie. (2019). *Research Methods for Business* (8th Edition). Wiley.

- Vollero, A. (2022a). Understanding Greenwashing. In *Greenwashing* (pp. 1–20). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-966-920221001>
- Vollero, A. (2022b). Understanding Greenwashing. In *Greenwashing* (pp. 1–20). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-966-920221001>
- Von Münchhausen, S., Volk, C., Pop, O., Vosburg, K., Barr, C., & Garz, H. (2024). *ESG Risk Ratings*.
- WHO Newsroom. (n.d.). *More than 100 reasons to quit tobacco*. <https://www.who.int/newsroom/spotlight/more-than-100-reasons-to-quit-tobacco>
- Ylitörmänen, T., Tarasenko, Y. N., Ruokolainen, O., Hiilamo, H., Pekka, P., & Ollila, H. (2023). Implementation of the Article 13 WHO FCTC measures and changes in cigarette smoking among youth in 42 countries. *BMJ Global Health*, 8(12). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-013255>

